

## LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR. BHASKARA PAKTO TAHUN 2017

### I. PENDAHULUAN

Laporan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.4//POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara berkesinambungan merupakan salah satu kunci dapat bertahannya perusahaan dalam menghadapi persaingan. Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG

Penilaian GCG dilakukan dengan metode *self-assessment* berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industry perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency), dan Kewajaran (Fairness).

### II. RUANG LINGKUP TATA KELOLA PERUSAHAAN

#### 1. PENGERTIAN UMUM

Suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency), dan Kewajaran (Fairness).

#### 2. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- Meningkatkan Kinerja PT. BPR Bhaskara Pakto
- Melindungi pemangku kepentingan (stakeholder) PT. BPR Bhaskara Pakto
- Meningkatkan kepatuhan manajemen dan karyawan PT. BPR Bhaskara Pakto terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan.

#### 3. KOMITMEN TATA KELOLA

BPR Bhaskara Pakto telah berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola yang baik yang telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia serta pelaksanaan terhadap peraturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA

Sebagai Lembaga kepercayaan PT. BPR Bhaskara Pakto dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu : keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (Independency), dan Kewajaran (Fairness).

# PT BPR BHASKARA PAKTO

Jl. Jenggolo 6-7 Dampit

1. **Keterbukaan (Transparency)** : Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan
2. **Akuntabilitas (Accountability)** : Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung-jawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif
3. **Pertanggungjawaban (responsibility)** : Kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. **Independensi ( Independency )** : Pengelolaan BPR secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun
5. **Kewajaran ( Fairness )** : Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan ( stakeholders ) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan

## III. STRUKTUR TATA KELOLA PT. BPR BHASKARA PAKTO

PT.BPR Bhaskara Pakto telah memiliki Governance Structure yang sangat memadai untuk melaksanakan tata kelola yang baik. Jumlah,Komposisi, Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan persyaratan dan penunjukannya sesuai dengan ketentuan dan melalui RUPS.

Governance Structure juga diperkuat dengan pengangkatan beberapa Pejabat Eksekutif yang pengangkatannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya serta mempunyai pedoman kerja tertulis sebagai landasan kerja.

### 1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi PT. BPR Bhaskara Pakto melalui RUPS tertanggal 29 Nopember 2017 berdasarkan Akta No. 5 pada notaris GALUH EVA PURNAMA , Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Malang,. dengan susunan Direksi per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

Susunan Dewan Direksi :

No.	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Ika AR Santoso
2	Direktur	-

Keterangan :

- Komposisi Direksi Tetap
- Tidak ada perangkapan jabatan diperusahaan / lembaga lain

### TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
3. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan / atau otoritas lainnya
4. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi
5. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.
  - a. Pemisahan tugas dan tanggungjawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan

# PT BPR BHASKARA PAKTO

Jl. Jenggolo 6-7 Dampit

- b. Penunjukan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
6. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan : Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan.
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan komisaris.

Anggota Direksi PT. BPR Bhaskara Pakto telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dengan mengikuti training / pelatihan / seminar/workshop / lokakarya / sosialisasi antara lain :

NO	NAMA DIREKSI	JENIS PELATIHAN	TANGGAL	LEMBAGA
1	IKA AR SANTOSO	Penerapan Tata Kelola BPR	17-02-2017	PT. EMG
		Revitalisasi Remedial Legal	03-05-2017	PT. EMG
		Intuisi Pemenang	08-07-017	PT. EMG
		RBB	15-09-2017	PT. EMG

## TINDAK LANJUT REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS OLEH DIREKSI PADA TAHUN LAPORAN 2017

- Direksi menindak lanjuti rekomendasi dari dewan komisaris terbukti dengan kinerja semakin meningkat.

## 2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris PT. BPR Bhaskara Pakto Melalui RUPS tertanggal 29 Nopember 2017 berdasarkan akta No. 5 pada notaris GALUH EVA PURNAMA , Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Malang,. dengan susunan Dewan Komisaris Per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris :

NO	NAMA	NAMA JABATAN
1	Komisaris Utama	Agus Swastanto
2	Komisaris	AA. Gde Sutedja

Keterangan :

- Jumlah Komisaris telah terpenuhi sesuai peraturan
- Komposisi komisaris tetap
- Tidak ada perangkapan jabatan diperusahaan / lembaga lain

### Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris :

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris :

# PT BPR BHASKARA PAKTO

Jl. Jenggolo 6-7 Dampit

- a. Wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
  - b. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan :
    - Penyediaan dana kepada pihak terkait
    - Melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan
    - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.
4. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :
- a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

### 3.KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Sebagai tindak lanjut dari Penerapan Tata Kelola, kelengkapan dan pelaksanaan Fungsi Audit Intern, fungsi manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan sebagai berikut

NO	NAMA PEJABAT EKKSEKUTIF	JABATAN	SK. OJK
1	Endah Yuniati	PE Fungsi Kepatuhan & Managemen Resiko	No. S-1000/KO.34/2015
2	Wiwin Trisnaning Dyah	PE Audit Internal	No. S-166/KO.041/2017
3	Happy Setyo Agustin	Kabag.Operasional	No.S-369/KO.041/2016
4	Eva Wahyu W	Kabag. Kredit	No.S-63/KO.34/2015

Keterangan :

Pejabat Eksekutif PT. BPR Bhaskara Pakto telah dibentuk berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya dan tidak ada perangkapan jabatan sehingga pelaksanaan struktur tata kelola di BPR dapat berjalan efektif

### TUGAS & TANGGUNGJAWAB PEJABAT EKSEKUTIF AUDIT INTERN, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

- **PEJABAT PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN**
  1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
  2. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akutansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
  3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
  4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

# PT BPR BHASKARA PAKTO

Jl. Jenggolo 6-7 Dampit

5. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Pejabat Pelaksana Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen

- **Tugas dan Tanggungjawab dari Pejabat Pelaksana Fungsi Kepatuhan sebagai berikut :**

1. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan
2. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
3. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
4. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
5. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan peraturan perundang-undangan lain;
6. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
8. Melaksanakan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.

Pejabat Pelaksana fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, pengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang saham pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

- **Tugas dan Tanggungjawab dari Pejabat Pelaksana Fungsi Manajemen Resiko sebagai berikut :**

1. Pemantauan pelaksana kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Resiko yang telah disetujui oleh Direksi;
2. Pemantauan posisi resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan per jenis aktivitas fungsional;
3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktifitas baru;
4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan/atau komite Manajemen Risiko.

Pejabat Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan komisaris. Direksi dan/atau Pemegang saham pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

# PT BPR BHASKARA PAKTO

Jl. Jenggolo 6-7 Dampit

## IV. HUBUNGAN KEPENGURUSAN, KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT. BPR BHASKARA PAKTO

### 1. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DIREKSI DI PERUSAHAAN/GRUP USAHA BPR LAINNYA

NAMA	JABATAN	DEWAN KOMISARIS	DIREKSI LAIN	PEMEGANG SAHAM
Ika AR Santoso	Direktur Utama	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan -	Tidak ada hubungan

Keterangan :

Direksi tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi lain, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR Bhaskara Pakto yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

### 2. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI DI PT. BPR BHASKARA PAKTO DAN PERUSAHAAN / GROUP USAHA BPR LAINNYA

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di sektor jasa keuangan akan mempengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha yang tergabung dalam suatu kelompok Group Usaha Keuangan.

NO	NAMA BPR	PERSENTASE KEPEMILIKAN	SAHAM DIREKSI
1	-	-	-

Keterangan :

Direksi tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR Bhaskara Pakto yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

### 3. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT. BPR BHASKARA PAKTO

NAMA	JABATAN	DEWAN KOMISARIS	DIREKSI LAIN	PEMEGANG SAHAM
Ika AR Santoso	Direktur Utama	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

Keterangan :

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Lain, Pemegang saham Pengendali atau hubungan dengan BPR Bhaskara Pakto Yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk tidak bertindak independen

# PT BPR BHASKARA PAKTO

Jl. Jenggolo 6-7 Dampit

## 4. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT. BPR BHASKARA PAKTO

NAMA	JABATAN	DEWAN KOMISARIS	DIREKSI LAIN	PEMEGANG SAHAM
Ika AR Santoso	Direktur Utama	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan -	Tidak ada hubungan

Keterangan :

Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi lain, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan PT. BPR Bhaskara Pakto yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

## V. PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT. BPR BHASKARA PAKTO PADA TAHUN LAPORAN 2017

NO	JENIS REMUNERASI PER ORANG DLM 1 THN	JUMLAH DEWAN KOMISARIS	JUMLAH DIREKSI
1	Di atas Rp. 1 M s.d 2 M	0	0
2	Diatas Rp.500 juta s.d 1 M	0	0
3	Rp. 500.000 juta ke bawah	2	1

## VI. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH DI PT. BPR BHASKARA PAKTO PADA TAHUN LAPORAN 2017

NO	URAIAN	RASIO
1	Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	2,46 : 1,00
2	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	1,25 : 1,00
3	Rasio Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,50 : 1,00
4	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Komisaris Tertinggi	3,3 0 : 1,00
5	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,83 : 1,00

Keterangan :

Gaji yang diperbandingkan dengan rasio gaji termaksud diatas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan komisaris, anggota Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap PT. BPR Bhaskara Pakto sampai batas pelaksana. Kriteria gaji pegawai yang dimasukkan sebagai pembanding adalah pegawai tetap

## VII. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS PT. BPR BHASKARA PAKTO PADA TAHUN 2017

- Jumlah Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2017 adalah 4 ( empat ) kali
- Tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris di setiap rapat adalah sebanyak 4 ( empat ) kali dihadiri lengkap oleh kedua anggota Dewan Komisaris

# PT BPR BHASKARA PAKTO

Jl. Jenggolo 6-7 Dampit

## VIII. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD) DI PT. BPR BHASKARA PAKTO PADA TAHUN LAPORAN 2017

Selama periode tahun 2017 tidak terdapat penyimpangan / kecurangan (internal fraud) yang dilakukan oleh Dewan komisaris, Direksi, Pegawai Tetap dan pegawai tidak tetap sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

INTERNAL FRAUD 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	DEWAN KOMISARIS		DIREKSI		PEGAWAI TETAP		PEG.TDK TETAP	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Total Fraud	—	—	—	—	—	—	—	—
Telah diselesaikan	—	—	—	—	—	—	—	—
Dalam Proses Penyelesaian di Internal BPR	—	—	—	—	—	—	—	—
Belum diupayakan penyelesaiannya	—	—	—	—	—	—	—	—
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	—	—	—	—	—	—	—	—

## IX. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DI PT. BPR BHASKARA PAKTO PADA TAHUN LAPORAN 2017

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai ( Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	—	—
Dalam proses penyelesaian	—	—
TOTAL	-	-

## X. TRANSAKSI YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN DI PT. BPR BHASKARA PAKTO PADA TAHUN LAPORAN 2017

Selama periode tahun 2017 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

## XI. AUDIT EKSTERN

Laporan Keuangan akan diaudit oleh akuntan public yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama. Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan audit harus sesuai dengan standart professional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit. Adapun KAP yang dipakai dalam 2 (dua) tahun terakhir ( tahun 2016 & 2017 ) adalah KAP."Drs. Suprihadi & Rekan".



# PT BPR BHASKARA PAKTO

Jl. Jenggolo 6-7 Dampit

## **XII. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK) PADA TAHUN LAPORAN 2017**

Selama tahun laporan 2017, tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha.

## **XIII. RENCANA BISNIS BANK**

BPR telah menyusun rencana bisnis yang mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan menyampaikan rencana bisnis tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman kepada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR.

## **XIV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BPR Bhaskara Pakto menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR.

1. Laporan Keuangan Publikasi Keuangan Triwulan ditempel dipapan ruang tunggu nasabah
2. Laporan Keuangan Publikasi Keuangan Tahunan ditempel dipapan ruang tunggu nasabah dan dimedia cetak
3. Transparansi mengenai produk dan/atau layanan dapat diakses di website resmi BPR Bhaskara Pakto di alamat <http://bprbhaskarapakto.co.id>

## **XV. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK PADA TAHUN LAPORAN 2017**

Secara garis besar, program kegiatan sosial PT. BPR Bhaskara Pakto selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

<b>NAMA PENERIMA</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TUJUAN PENGGUNAAN</b>
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

# PT BPR BHASKARA PAKTO

Jl. Jenggolo 6-7 Dampit

## XVI. LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR BHSAKARA PAKTO PADA TAHUN LAPORAN 2017

NO	KRITERIA/INDIKATOR	SKALA PENERAPAN				
		STRUKTUR	PROSES	HASIL	S+P+H	NILAI BOBOT FAKTOR
1	Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Direksi	1,17	1,20	0,36	2,73	0,61
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan komisaris	1,5	1,25	0,40	3,15	0,53
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi komite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1,00	0,80	0,40	2,20	0,24
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1,70	1,84	0,43	3,97	0,42
6	Penerapan Funfgsi Audit Intern	1,00	0,80	0,25	3,30	0,37
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1,00	0,80	0,20	2,05	0,06
8	Penerapan Manajement Resiko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1,50	1,20	0,25	2,95	0,25
10	Rencana Bisnis	1,50	1,20	0,30	3,00	0,25
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2,00	1,20	0,25	3,45	0,29
NILAI KOMPOSIT SEBELUM PENERAPAN MANAJEMENT RESIKO						<b>3,01</b>

# PT BPR BHASKARA PAKTO

Jl. Jenggolo 6-7 Dampit

## KESIMPULAN HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PT. BPR BHASKARA PAKTO

NILAI KOMPOSIT

3,01

PREDIKAT KOMPOSIT

Sangat Baik

### ANALISIS

1. Proses penerapan tata kelola PT. BPR Bhaskara Pakto berdasarkan penilaian telah berjalan cukup efektif dan efisien serta didukung oleh struktur organisasi Tata Kelola yang cukup lengkap.
2. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola PT. BPR Bhaskara Pakto berdasarkan penilaian telah lengkap sesuai ketentuan.

Dampit, 27 April 2018

**PT. BPR. BHASKARA PAKTO**

**IKA AR SANTOSO**

Direktur Utama

**AGUS SWASTANTO**

Komisaris Utama